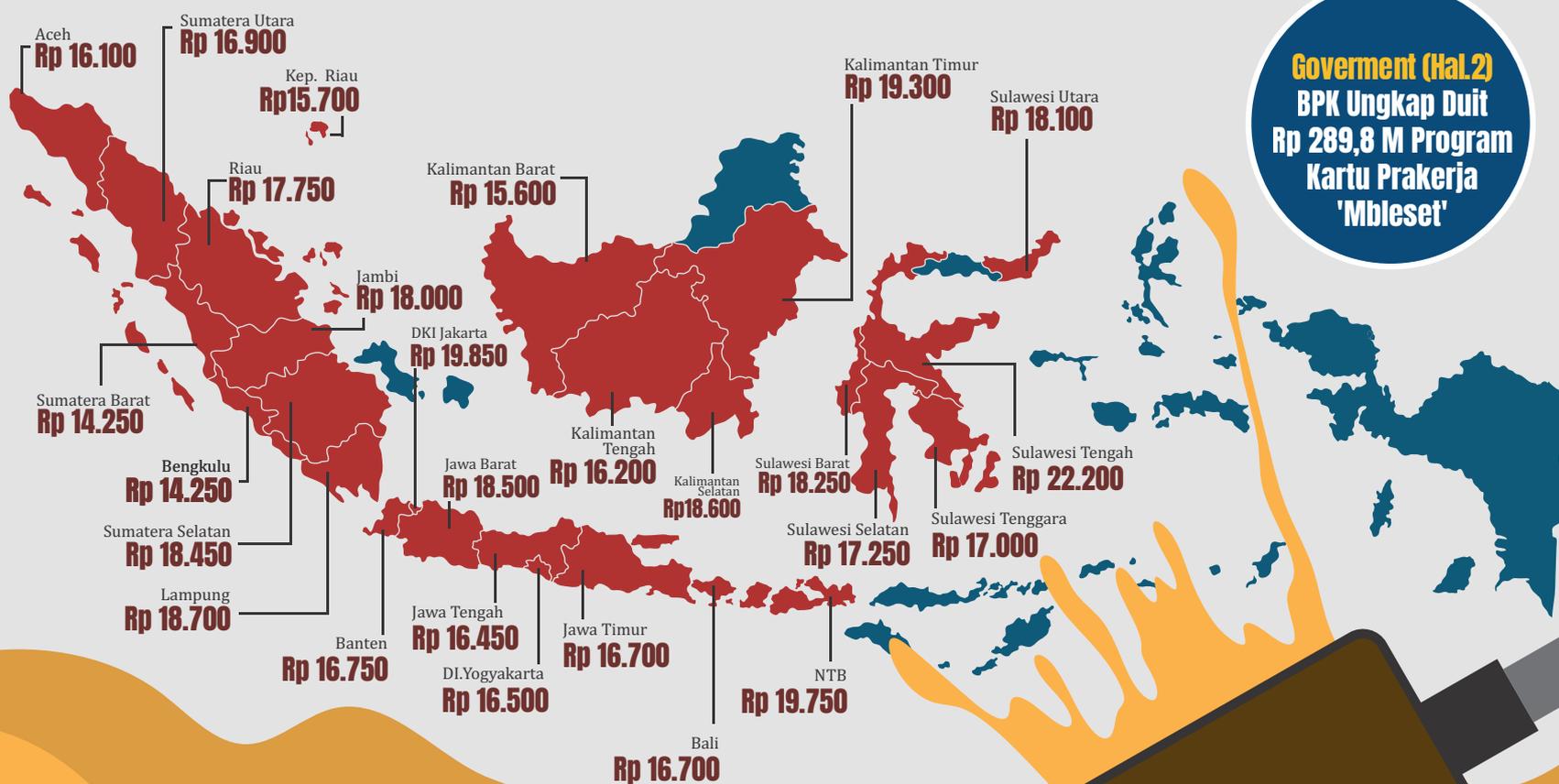




SUBSIDI MIGOR CURAH DISETOP HARGA BISA 'GILA' LAGI

Tanggal 31 Mei 2022 atau sepekan lagi kegaduhan harga minyak goreng (migor) potensi terjadi kembali. Sebab, pada hari tersebut Kementerian Perindustrian mengatakan program subsidi migor curah akan dihentikan. Artinya, Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14.000/liter--yang memang tidak pernah terwujud--tak akan ada lagi. Dengan kata lain, migor 'plastik tali karet' harganya dilepas ke pasar seperti produk kemasan. Sudah menjadi rahasia umum, migor kemasan meski stoknya kini gampang didapatkan, harganya masih bertengger tinggi di Rp 25.000/liter. Padahal, pemerintah mengklaim harga komoditas sudah terkendali sehingga kebijakan akan diganti dengan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun untuk kesekian kalinya dipasang sebagai 'komandan'. Kali ini yang harus dijinakkan adalah keliaran harga migor. Bahkan pihak oposisi, Partai Demokrat memberikan julukan baru yaitu 'Menko Minyak Goreng'. Duh, balada migor tak berujung!

(Baca Hal 11)



Government (Hal.2)
BPK Ungkap Duit
Rp 289,8 M Program
Kartu Prakerja
'Mbleset'

**HARGA MINYAK GORENG CURAH
DI BERBAGAI DAERAH INDONESIA
(PERIODE 24 MEI 2022)**

Sumber:kemendag

Dalam rangka Hari Kenaikan Isa Almasih, Koran Lentera Today edisi Kamis (26/5/2022). Terbit kembali Jumat (27/5/2022). Update berita tetap bisa diikuti di www.lenteratoday.com

BPK Ungkap Duit Rp 289,8 M Program Kartu Prakerja 'Mbleset'

JAKARTA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan permasalahan penyaluran bantuan Kartu Prakerja dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II tahun 2021. Terdapat pemborosan hingga Rp 289,85 miliar karena 'mbleset' atau tak tepat sasaran.

Ketua BPK, Isma Yatun, menjelaskan hasil pemeriksaan prioritas nasional terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) BPK pada IHP semester II 2021 mengungkap permasalahan program Kartu Prakerja tersebut. "Bantuan program Kartu Pekerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp 289,85 miliar pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran karena diterima oleh pekerja atau buruh yang memiliki gaji atau upah atas Rp 3,5 juta," kata Isma saat rapat paripurna, Selasa (24/5).

Atas permasalahan ini, kata Isma, BPK merekomendasikan kepada Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar memperjelas pengaturan mengenai lingkup besaran batasan gaji atau upah bulanan bagi pendaftar program Kartu Prakerja.

Dalam pemeriksaan tersebut, BPK juga mengungkap permasalahan alokasi vaksin Covid-19, logistik dan sarana prasarannya belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan yang sesuai dengan perkembangan kondisi, analisis situasi terbaru, data yang valid paling akurat dan mutakhir.

Adapun dalam hasil pemeriksaan prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi, BPK juga menemukan permasalahan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Kementerian Dalam Negeri belum seluruhnya dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya.

Selanjutnya, mekanisme verifikasi dan sistem informasi pengelolaan permohonan belum dapat menjamin kelayakan penerima insentif perpajakan PC-PEN. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak belum memiliki fungsi koordinasi yang terpusat dalam pengelolaan insentif atau fasilitas perpajakan.

Isma berkata, IHP semester II-2021 ini juga memuat hasil pemeriksaan keuangan, kinerja, dan DTT yang tidak termasuk dalam kelompok pemeriksaan prioritas nasional untuk mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan.

Sejak 2005 hingga 2021, BPK telah menyampaikan 633.648 rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar Rp 305,84 triliun kepada entitas yang diperiksa. Hasil



(Ilustrasi) Job Fair menjadi salah satu pilihan para pencari kerja untuk mencari pekerjaan. (foto-dok)

pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi tersebut menunjukkan sebanyak 490.014 rekomendasi sebesar Rp 156,10 triliun telah sesuai.

Lalu sebanyak 105.193 rekomendasi sebesar Rp 100,15 triliun belum sesuai, 31.709 rekomendasi sebesar Rp 27,89 triliun belum ditindaklanjuti, dan 6.732 rekomendasi sebesar Rp 21,70 triliun tidak dapat ditindaklanjuti.

Secara kumulatif hingga 31 Desember 2021, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran uang dan atau penyerahan aset sebesar Rp 117,52 triliun. Capaian tersebut merupakan implementasi komitmen entitas untuk bersama mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.

Cemas Kebocoran Data

Di sisi lain, BPK meminta Kementerian Kominfo untuk mempercepat menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi dan mengesahkannya. Ini tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021.

Dalam ikhtisar tersebut BPK memberikan rekomendasi pada Menteri Kominfo, Johnny Plate untuk melaksanakan beberapa langkah. Salah satunya menginstruksikan Direktur Jenderal Aptika yang juga Ketua Panja Pemerintah dalam pembahasan RUU PDP dengan DPR RI untuk melakukan langkah percepatan dan komunikasi intensif dengan DPR.

"Menginstruksikan Direktur Jenderal Aptika, selaku Ketua Panja Pemerintah dalam pembahasan RUU PDP dengan DPR RI, supaya melakukan langkah-langkah percepatan dan komunikasi yang

intensif dengan DPR RI untuk menyelesaikan RUU PDP dan mengesahkannya sebagai undang-undang, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan," tulis BPK dikutip Selasa (24/5).

Selain itu BPK juga meminta menyusun aturan turunan soal keamanan dan ketahanan siber. Khususnya terkait PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PSBE).

BPK menilai kedua aturan dan turunannya belum disusun secara integratif dan memadai. Dengan begitu membuat penyelenggara sistem elektronik (PSE) belum memprioritaskan perlindungan data pribadi dan membuat rentan adanya kebocoran, pencurian, dan serangan.

"Serta pelaksanaan teknis dan operasional PP Nomor 71 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik masih terhambat," tutur BPK.

BPK juga menyoroti soal standar PSE baik di ranah publik dan privat. Lembaga itu menilai prosedurnya belum memadai mencegah kebocoran atau pencurian data. Dengan begitu membuat tingkat kepatuhan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi penyelenggara negara lain yang mendaftarkan sistem elektronik yang dikelola menjadi sangat rendah.

Menurut BPK, ini menjadi PSE di publik ataupun privat menjadi rentan mulai dari serangan, kebocoran, hingga pencurian data di dalamnya. "Dan PSE lingkup publik maupun lingkup privat rentan terhadap serangan, kebocoran, dan pencurian data," jelas BPK. (surya,isti,rls,ant/dya)

TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

(Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester/IHP II Tahun 2021)

TOTAL KASUS

Sebanyak 4.555 kasus yang memuat 6.011 permasalahan dengan potensi kerugian sebesar Rp 31,34 triliun.

Rinciannya

- Sebanyak 3.173 permasalahan terkait ketidakefisienan, ketidakefektifan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp 1,64 triliun.
- Sebanyak 1.720 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 29,70 triliun
- Sebanyak 1.118 permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TERSEBUT

Tindak lanjut rekomendasi tersebut

Hasil Tindak Lanjut:

- Sebanyak 490.014 rekomendasi sebesar Rp 156,10 triliun telah sesuai.
- Sebanyak 105.193 rekomendasi sebesar Rp 100,15 triliun belum ditindaklanjuti
- Sebanyak 31.709 rekomendasi sebesar Rp 27,89 triliun belum ditindaklanjuti
- Sebanyak 6.732 rekomendasi sebesar Rp 21,70 triliun tidak dapat ditindaklanjuti.



DPR Sahkan RUU PPP, Buruh Ancam Demo Selama 3 Hari

(Ilustrasi) Buruh mengancam demo besar-besaran pada 8 Juni 2022 usai DPR mengesahkan RUU PPP yang menjadi landasan hukum UU Omnibus Law Cipta Kerja, Selasa (24/5/2022) hari ini. (Foto:dok)



JAKARTA-Rapat Paripurna DPR secara resmi telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) yang menjadi landasan hukum UU Omnibus Law Cipta Kerja, Selasa (24/5) hari ini. Partai Buruh bersama Serikat Buruh pun langsung bergolak dan mengancam menggelar aksi demo besar tiga hari berturut-turut mulai 8 Juni 2022 mendatang.

Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-23 masa sidang V tahun sidang 2021-2022 yang dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani. "Apakah RUU tentang perubahan kedua atas UU nomor 13 tahun 2011 tentang PPP dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" ujar Puan dan dijawab setuju serentak oleh peserta rapat.

Rapat Paripurna pengesahan RUU PPP dihadiri total 338 anggota dewan,

dengan rincian 56 orang hadir secara fisik 220 orang hadir secara virtual. Sedangkan, sebanyak 62 orang tak hadir atau izin. "Dengan demikian kuota forum (kuorum) telah tercapai," kata dia.

"Melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 8 Juni 2022 yang melibatkan puluhan ribu buruh di DPR RI. Dan secara bersamaan aksi dilakukan serempak di puluhan kota industri lainnya yang dipusatkan di Kantor Gubernur," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangannya.

Said menerangkan aaksi besar-besaran ini bakal digelar selama tiga hari berturut-turut. Massa akan membawa tuntutan menolak dibahasnya kembali Omnibus Law UU Cipta Kerja. "Kami mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2022 tentang revisi UU PPP tersebut," kata Said.

Untuk diketahui revisi UU PPP adalah inisiatif DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional. Sebab, metode omnibus dalam pembuatan UU Cipta Kerja tak diatur dalam sistem pembuatan perundang-undangan.

"Melakukan stop produksi atau mogok nasional kalau Omnibus Law UU Cipta Kerja dipaksa dibahas mengulang kembali apa yang sudah dipersoalkan dari awal hanya karena revisi UU PPP disebut demi menyasiasi hukum," kata Said.

Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional karena metode pembuatannya tak sesuai dengan UU PPP. Akan tetapi MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku hingga 2023, batas akhir DPR untuk melakukan revisi. Akhirnya DPR Sahkan RUU PPP.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli. "Kami kecewa berat kepada wakil-wakil kita di parlemen," ujarnya. Terkait rencana mogok ini, Ferri belum dapat memastikannya. Ia mengatakan Partai Buruh bakal segera memberikan pernyataan sikap mengenai hal ini. "Kami akan adakan konferensi resmi," ujar dia.

Insiden Mikrofon Mati

Insiden mikrofon mati di Ruang Rapat Paripurna DPR kembali terjadi saat Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat itu pada Selasa (24/5) siang. Insiden tersebut terjadi saat Puan hendak menutup rapat paripurna yang telah berlangsung selama 3 jam itu.

Kemudian, salah seorang anggota yang diketahui belakangan dari Fraksi

PKS bernama Amin AK hendak menyampaikan interupsi. "Interupsi pimpinan," kata Amin dalam rapat.

Puan mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan bahwa rapat ini akan ditutup karena sudah masuk waktu salat zuhur. "Tolong Pak, tadi saya sudah sampaikan sudah masuk acara salat zuhur," ujar politikus PDIP itu. Lalu, Amin AK kembali menyampaikan bahwa dirinya ingin menyampaikan interupsi. "Interupsi pimpinan, pimpinan interupsi 1 aja," ucap Amin. Puan pun memberikan waktu untuk 1 menit saja untuk Amin menyampaikan interupsinya. "1 menit Pak," ujar Puan. Namun, Amin AK menawar agar dirinya bisa menyampaikan interupsi setidaknya 4 menit. "4 menit pimpinan," pintanya.

Kemudian, Amin AK pun berhasil menyampaikan interupsinya. Amin menyampaikan interupsi soal ketiadaan pengaturan mengenai LGBT dalam KUHP. Dia pun menyebutkan kejadian terkini mengenai LGBT seperti viralnya podcast Deddy Corbuzier mengenai pasangan gay dan juga dikibarkannya bendera LGBT di kantor Kedubes Inggris di Jakarta. Tetapi, belum selesai Amin menyampaikan interupsinya, mikrofonnya mendadak mati setelah 3 menit ia berbicara.

Puan pun melanjutkan untuk menutup Rapat Paripurna DPR. "Yang terhormat para anggota dewan, hadirin yang kami muliakan. Dengan demikian, selesailah rapat paripurna dewan pada hari ini," kata Puan. Amin pun masih berusaha untuk mendapatkan waktu menyelesaikan interupsinya. "Terakhir, penutup pimpinan, maaf, penutup pimpinan," kata Amin.

Seolah tak mendengar, Puan pun melanjutkan untuk menutup Rapat Paripurna DPR pada siang ini. "Dengan seizin sidang dewan maka izinkanlah kami menutup rapat paripurna dengan mengucapkan alhamdulillahirobbil aalamiin," pungkas Puan disambut tepuk tangan anggota dewan yang hadir

Puan sebelumnya menyebut revisi UU PPP dilakukan pemerintah dan DPR karena tidak mengatur mekanisme pembentukan UU secara omnibus law atau gabungan. Revisi UU PPP nantinya akan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam amar putusannya, MK sebelumnya agar UU Cipta Kerja diperbaiki dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.

Jika dalam tenggang waktu tersebut tidak diperbaiki, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Revisi UU PPP telah disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat satu pada 13 April 2022. RUU PPP disetujui delapan dari sembilan fraksi. Hanya Fraksi PKS yang menolak pengesahan RUU PPP.-(surya,rls,ant/dya)

BEBERAPA POIN PERUBAHAN UU PPP

1. Penjelasan Pasal 5 huruf g diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

● (1) Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pengujian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

● (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

● (3) Penanganan pengujian terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR, yang membahas Rancangan Undang-Undang dengan melibatkan komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan.

● 4) Dalam hal alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah tidak ada pada saat undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan menjadi kuasa DPR.

● (5) Penanganan pengujian terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Pemerintah, dilaksanakan oleh 4 menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan melibatkan menteri atau kepala lembaga terkait.

● (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan DPR serta penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

3. Setelah Bagian Keenam Bab IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketujuh Perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus

4. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 42A Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

● Pasal 49 (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.

● (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPR diterima.

● (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan 5 menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Warning Jokowi: Uang Rakyat Jangan Dibelikan Barang Impor!



(Ilustrasi) Pemerintah Daerah dan Kementerian didorong untuk meningkatkan belanja produk lokal, karena selama ini APBN dan APBD banyak dibelikan produk impor. (foto-dok)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahannya dalam acara evaluasi aksi afirmasi Bangsa Buatan Indonesia di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5). Dalam kesempatan itu, Jokowi mewanti-wanti agar uang rakyat jangan digunakan untuk membeli produk impor.

Kepala negara mengingatkan nominal anggaran pemerintah dalam APBN hingga APBD begitu besar. Perinciannya APBN Rp 2.714 triliun dan APBD Rp 1.197 triliun. Jumlah itu belum termasuk anggaran yang dibelanjakan BUMN.

"Seperti yang sampaikan di Bali karena ini uang rakyat, APBN, APBD, BUMN ini uang rakyat ya jangan dong kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu. Sehingga muncul Bangsa Buatan Indonesia ini," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan itu, kepala negara mengatakan kalau pertemuan dan evaluasi akan dilakukan setiap 2-3 bulan. Tujuannya untuk memastikan penggunaan produk dalam negeri terus meningkat. "Sekali lagi jangan APBN, APBD jangan untuk beli barang-barang impor," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mewanti-wanti pejabat eselon I, II hingga sekretaris daerah agar melaksanakan BBI. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta kepada kepala daerah untuk memastikan produk unggulan lokal segera masuk e-katalog lokal.

"Segera. Yang punya e-katalog lokal baru 46 pemda dari 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Baru 46 pemda," ujar Jokowi.

"Padahal untuk membangun e-katalog lokal ini syaratnya sudah nggak kayak dulu. Dulu memang rumit sekarang sangat simpel. Saya

tadi memastikan tadi pagi kepada kepala LKPP Pak Anas (Abdullah Azwar Anas). Dulu berapa langkah? Dulu 8 langkah, sekarang hanya dua langkah. Sangat gampang sekali," lanjutnya.

Selain itu, Jokowi menyoroti beberapa instansi yang serapan anggarannya masih kecil. Bahkan ada yang masih nol persen. "Kelihatan semuanya. 107 pemda serapannya masih 5 persen, bahkan yang 17 pemda masih nol persen," ujar Jokowi.

Instansi yang serapan anggarannya masih kecil nantinya akan ditayangkan. Jokowi ingin instansi-instansi ini merasakan efek jera. "Sebetulnya mau saya tayangin, tapi nggak, sepertinya bulan September saja, biar kelihatan semua. Nih, pemda mana, nih kementerian mana. Biar kapok, tayangkan. Mana komitmennya? 100 realisasi hanya 5,"

ungkapnya.

Belanja Melambat

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada April 2022 sebesar Rp 175,86 triliun atau 15,66% terhadap APBD. Realisasi ini mengalami penurunan 1,1% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 177,87 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerinci, jika dilihat berdasarkan jenisnya belanja daerah terdiri dari belanja pegawai yang realisasinya Rp 91,10 triliun atau naik 0,8% dari periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 90,40 triliun.

"Kenaikan belanja pegawai antara

lain dikarenakan sebagian besar daerah telah merealisasikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan tunjangan hari raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)," tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita Senin (23/5).

Kemudian, untuk realisasi belanja barang dan jasa mencapai Rp 41,77 triliun atau naik 1,8% dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 41,02 triliun. Sri Mulyani mengatakan, kenaikan belanja barang dan jasa ini antara lain dikarenakan adanya peningkatan belanja alat berat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis diikuti dengan belanja perjalanan dinas.

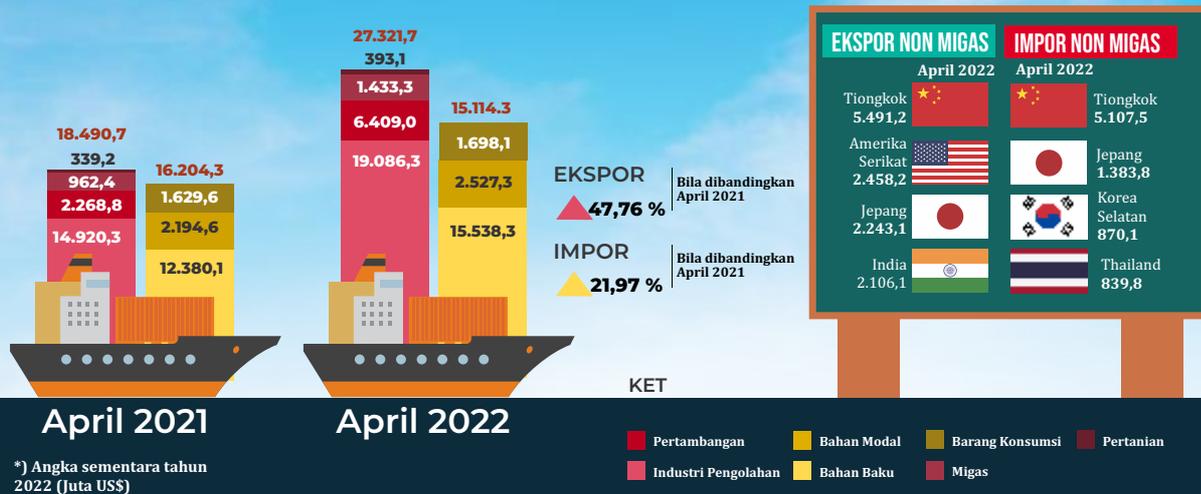
Lalu, untuk belanja modal realisasinya mencapai Rp 9,32 triliun atau naik 6,4% dari belanja tahun lalu di periode yang sama Rp 8,76 triliun. Selanjutnya untuk belanja lainnya realisasinya sebesar Rp 33,68 triliun atau turun 10,7% dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 37,69 triliun.

Lebih lanjut, Sri Mulyani memaparkan, bahwa belanja daerah jika dilihat berdasarkan fungsinya telah digunakan untuk belanja ekonomi Rp 11,15 triliun atau meningkat 2,1% dari tahun lalu, belanja Kesehatan Rp 25,92 triliun, dan belanja perlindungan sosial Rp 1,72 triliun.

Realisasi belanja fungsi ekonomi tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan belanja fungsi Kesehatan dan perlintsos tumbuh lebih rendah. Hal ini sejalan dengan semakin rendahnya kasus Covid-19 (menurunnya realisasi belanja tidak terduga) dan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah. (surya, isti,rls, ant/dya)

PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA APRIL 2022*

Berita Resmi Statistik No.37/05/Th.XXV, 17 Mei 2022



Pemkab Blitar Raih Predikat WTP Ke-6 Kalinya Berturut-turut

BLITAR - Pemerintah Kabupaten Blitar kembali menorehkan prestasi dibidang pengelolaan keuangan, dengan berhasil memperoleh penilaian opini atau predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2021. Penghargaan tersebut merupakan yang ke 6 kalinya, diperoleh Pemkab Blitar secara berturut-turut

Penyerahan LHP penilaian WTP tersebut, diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur kepada Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Senin (23/5/2022).

Turut hadir mendampingi Bupati Rini saat menerima penghargaan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Izul Marom, Msi, Inspektur Agus Cunanto, SH.MH, serta Kepala BPKAD Kurdiyanto SE.Msi.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Sub Auditoriat Perwakilan Jatim Wilayah III dan IV serta Tim Pemeriksa. Selain Pemkab Blitar juga ada 3 daerah lainnya yang hadir untuk menerima dan semuanya memperoleh opini atau predikat WTP yaitu Pemkab Malang, Pemkab Lumajang dan Pemkot Pasuruan.

Pada kesempatan tersebut Bupati Blitar mendapat kehormatan menyampaikan sambutan mewakili 3 (tiga) pemerintah Daerah yang lain, dengan demikian Bupati Rini untuk kedua kalinya memperoleh kesempatan menyampaikan



Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah (ke 4 dari kiri) menerima LHP dengan predikat WTP dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur. (foto:istimewa)

sambutan dalam ajang prestisius penyerahan LHP dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setiono menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Daerah dan jajarannya, yang telah menyampaikan LKPD Tahun 2021 sebelum batas akhir penyampaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan Joko meskipun kualitas pengelolaan keuangan pmda menunjukkan peningkatan, namun masih dijumpai beberapa temuan signifikan di hampir semua wilayah pemeriksaan yang harus menjadi perhatian antara lain. "Diantaranya kelebihan pembayaran atas kekurangan dan mutu pekerjaan belanja modal, penatausahaan dan pengelolaan aset tetap yang belum

memadai, pengelolaan piutang daerah yang belum memadai, serta pembayaran/penetapan honorarium yang belum mempedomani ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Sementara Bupati Rini dalam sambutannya menuturkan rasa syukur, serta menyampaikan terima kasih atas arahan dan petunjuk BPK selama ini. "Tidak lupa juga disampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Blitar, atas dukungan dan kerjasamanya," tutur Bupati Blitar perempuan pertama ini.

Menurut Bupati Rini penyerahan LHP hari ini merupakan amanat perundang-undangan, dimana Pemerintah Daerah wajib menyerahkan laporan keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Lebih lanjut Bupati Rini menyampaikan bahwa penyampaian

LHP memiliki makna yang sangat penting, disamping merupakan bukti atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena opini atas LKPD akan menciptakan reputasi yang dapat menaikkan atau menurunkan, tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan atas LKPD yang disajikan. "Sedangkan bagi masyarakat sebagai pengguna utama hasil audit BPK, memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana capaian pelaksanaan atas mandat yang telah diberikan," paparnya.

Bupati Rini menandakan bahwa pemerintah daerah menyadari keterbatasan dan kondisi pengelolaan keuangan saat ini masih belum sempurna, namun semua daerah telah berkomitmen untuk terus memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada.

Namun dengan adanya kerja keras penuh pengabdian, tentu akan membawa perubahan berarti bagi peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dimasa mendatang. "Demikian juga terkait temuan, koreksi dan rekomendasi dari BPK RI akan menjadi prioritas dan perhatian utama untuk menindaklanjutinya," tandasnya.

Secara terpisah Inspektur Kabupaten Blitar, Agus Cunanto, SH.MH yang didampingi Kepala BPKAD Kabupaten Blitar, Kurdiyanto, SE.MSI mengatakan bahwa segala catatan dan rekomendasi dari hasil temuan BPK beserta langkah-langkah tindaklanjutnya, telah disepakati dan tertuang dalam Action Plan..(arief sukputra/*)

Wabah Cacar Monyet

Kemenkes: Bisa Sembuh Sendiri, Gejala 14-21 Hari

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Mohammad Syahril mengungkapkan, penyakit Monkeypox alias cacar monyet, biasanya bisa sembuh sendiri, dengan gejala yang berlangsung selama 14-21 hari.

Meski demikian, penyakit ini tetap perlu diwaspadai, terutama bagi anak-anak yang memiliki imunitas rendah. "Sama seperti halnya virus-virus yang lain, Monkeypox ini akan disembuh sendiri dengan kekuatan tubuh," katanya saat konferensi pers virtual, Selasa (24/5).

"Tapi masalahnya apabila dia berlanjut invasi dan erupsi, apabila pada orang dengan risiko tinggi, atau dengan pasti imunitas rendah." "Maka itu bisa juga berefek ke yang lebih berat atau lebih lama penyembuhannya," kata Syahril.

Kasus yang parah lebih sering terjadi pada anak-anak dan terkait

dengan tingkat paparan virus, status kesehatan pasien, dan tingkat keparahan komplikasi. Kasus kematian bervariasi, tapi kurang dari 10 persen dari kasus yang dilaporkan, dan sebagian besar di antaranya adalah anak-anak. Secara umum, kelompok usia yang lebih muda tampaknya lebih rentan terhadap penyakit Monkeypox.

Dirut RSPI Sulianti Suroso ini menyatakan, sampai saat ini di Indonesia belum ditemukan penyakit Monkeypox. "Dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, maupun Dinas Kesehatan belum ada laporannya soal Monkeypox," ungkapnya.

Dikutip dari laman Covid19.Kemkes.go.id, masa inkubasi (interval dari infeksi sampai timbulnya gejala) monkeypox biasanya 6-16 hari, tetapi dapat berkisar dari 5-21 hari. Gejala yang

timbul diawali dengan demam, sakit kepala hebat, limfadenopati (pembengkakan kelenjar getah bening), nyeri punggung, nyeri otot, dan lemas.

Limfadenopati dapat dirasakan di leher, ketiak, atau selangkangan. Dalam 1-3 hari setelah gejala awal atau fase prodromal, akan memasuki fase erupsi berupa munculnya ruam atau lesi pada kulit, biasanya dimulai dari wajah, kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya secara bertahap.

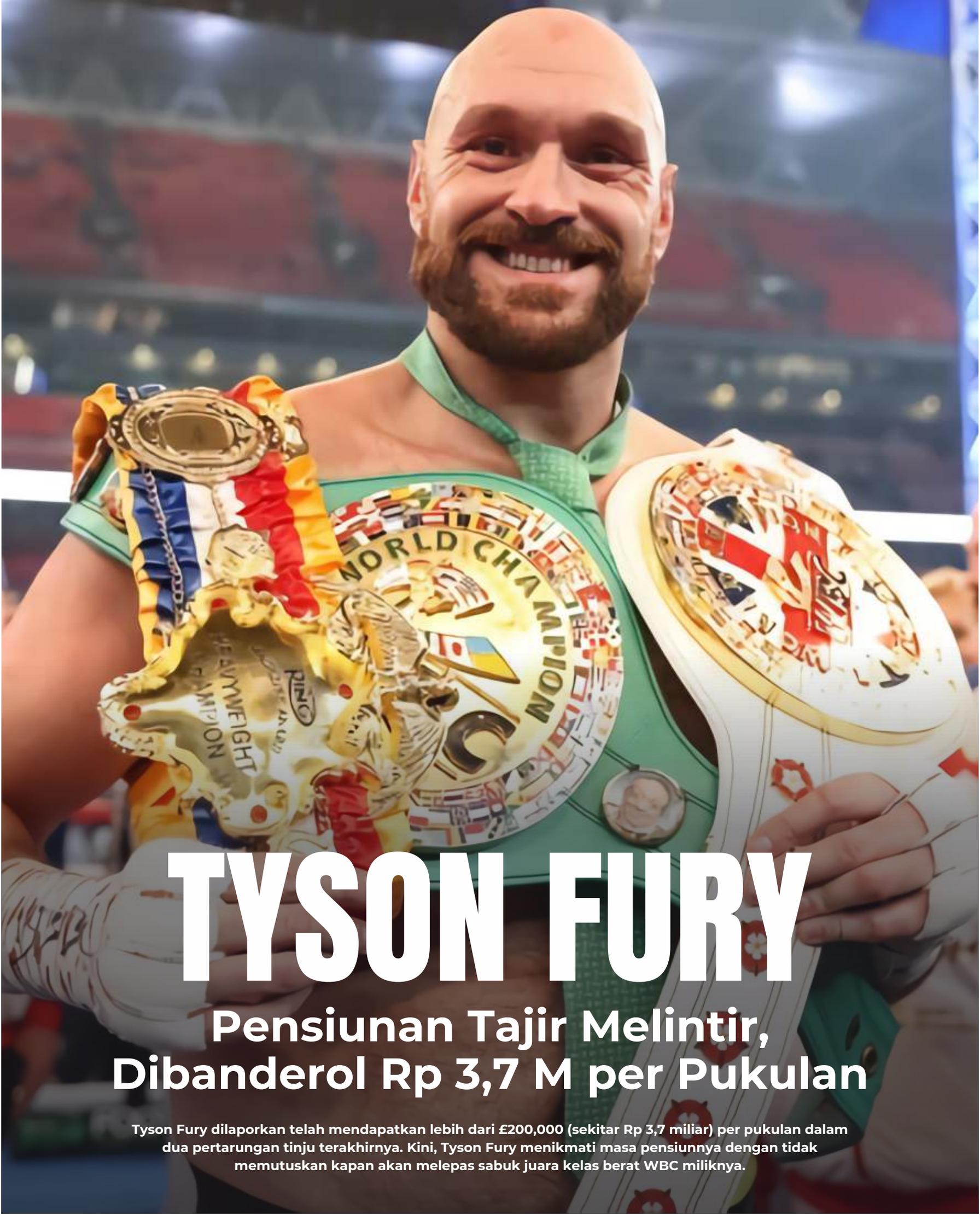
Ruam atau lesi pada kulit ini berkembang mulai dari bintik merah seperti cacar (makulopapula), lepuh berisi cairan bening, lepuh berisi nanah, kemudian mengeras atau keropeng, lalu rontok. Biasanya diperlukan waktu hingga tiga minggu sampai periode lesi tersebut menghilang dan rontok.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menegaskan wabah cacar

(Ilustrasi) Negara-negara di Eropa meningkatkan kewaspadaan wabah cacar monyet meskipun WHO memastikan kondisi terkendali. (Foto-reuters)



monyet yang tengah menyebar di Afrika, Eropa, dan Amerika tidak memerlukan vaksinasi massal. Menurut WHO, langkah-langkah menjaga kebersihan yang baik dan perilaku seksual yang aman dapat membantu mengendalikan dan mencegah penularan. (surya,ist, reuters/dya)



TYSON FURY

**Pensiunan Tajir Melintir,
Dibanderol Rp 3,7 M per Pukulan**

Tyson Fury dilaporkan telah mendapatkan lebih dari £200,000 (sekitar Rp 3,7 miliar) per pukulan dalam dua pertarungan tinju terakhirnya. Kini, Tyson Fury menikmati masa pensiunnya dengan tidak memutuskan kapan akan melepas sabuk juara kelas berat WBC miliknya.

FAKTA-FAKTA Tyson Fury pensiun karena dia bosan bermain politik dalam penentuan pertarungan termasuk kegagalan melawan Anthony Joshua. Pelatih Sugarhill Steward menegaskan bahwa alasan Tyson Fury pensiun karena tidak mendapatkan pertarungan yang dia inginkan. Tyson Fury mengkonfirmasi pengunduran dirinya dari ring tinju setelah mengalahkan Dillian Whyte bulan lalu.

Tyson Fury menyatakan dia telah mencapai semua yang ada untuk menang dalam tinju meskipun beberapa berpendapat dia harus mengalahkan Anthony Joshua dan Oleksandr Usyk. Fury dimaksudkan untuk menghadapi Joshua tahun lalu tetapi pertarungan gagal yang membuat Gypsy King muak dengan kekecewaan yang terus-menerus.

Salah satu alasan Tyson Fury pensiun adalah politik dalam penentuan pertarungan yang seringkali mengecewakannya. Steward mengatakan bahwa secara mental sang juara dunia kelas berat harus melalui negosiasi pertarungan hanya untuk pertarungan agar tidak terjadi. "Untuk dia yang pensiun, saya senang karena itulah yang dia inginkan. Saya tahu banyak dari pensiun berkaitan dengan tidak mendapatkan pertarungan yang dia inginkan dan itu benar-benar menantang secara mental untuk ditawarkan pertarungan dan melalui negosiasi untuk pertarungan dan kemudian bagi mereka untuk gagal pada akhirnya," kata Steward kepada Sky Sports.

"Hal-hal ini terjadi pada banyak petinju di seluruh dunia. Anda tidak akan mengharapkan itu terjadi di panggung sebesar ini, tetapi itu benar-benar terjadi dan itu adalah sesuatu yang harus dihadapi para petarung. Kami di luar terkadang tidak mengerti itu. Kami hanya mengatakan 'jika dia mendapat pertarungan dia akan kembali', itu tidak semudah berada di luar melalui apa yang terjadi di dalam. Tapi itu olahraga yang sangat dia

cintai, dan itu menyakitinya seperti itu. Hal-hal itu harus dipertimbangkan dan dihormati," papar Steward.

Keluarga Fury kini sibuk menikmati tahap awal pensiun sejak pertarungannya dengan Whyte. Dia membawa keluarganya, termasuk ayah John, ke selatan Prancis di mana mereka berjemur dan berolahraga. Namun, Fury tetap melanjutkan pelatihan dan merekam latihan larut malam baru-baru ini untuk menunjukkan bahwa dia tetap bugar.

Sebelumnya, The Punters Page telah merilis data tentang uang yang didapat Tyson Fury per pukulan di masing-masing dari 10 duel terakhirnya, belum termasuk melawan Whyte. Jadi, Fury yang mendaratkan total 1.077 pukulan mengantongi total £122.839.600,00 (sekitar Rp 2,26 triliun) dari 10 duel terakhirnya.

Data bayaran Tyson Fury per pukulan dari 10 duel terakhirnya sebelum melawan Dillian Whyte. Catatan, nilai per pukulan setiap duelnya bisa berbeda-beda, tetapi sekitar Rp 3,7 miliar atau lebih.

Tyson Fury merupakan salah satu petinju terkaya di muka bumi. Sampai-sampai, istri Fury yang bernama Paris merasa bahwa mereka kini sudah tak membutuhkan uang lagi. Data yang dirilis The Punters Page bisa menjadi bukti betapa tajirnya Fury. Dari 10 duel tinju terakhirnya sejak 2014 hingga 2021, ia dibayar per pukulan dan mengantongi total 122.839.600,00 poundsterling (sekitar Rp 2,26 triliun) karena mendaratkan total 1.077 pukulan.

Teranyar, Fury baru saja menumbangkan Dillian Whyte dalam duel tinju di Wembley, Inggris. Ia menang TKO usai bertarung 6 ronde dan sukses mempertahankan titel Kelas Berat WBC and The Ring. Menurut Mirror, pertarungan tersebut meningkatkan kekayaan bersih Fury menjadi £62 juta (sekitar Rp 1,14 triliun) sekarang. Maka dari itu, ia mantap menyatakan akan pensiun usai mengalahkan Whyte,

terlebih juga ia sudah janji kepada istrinya.

Paris mengatakan bahwa suaminya itu sudah tak perlu membuktikan banyak hal lagi di dunia tinju. Apalagi soal uang, ia menganggap Tyson Fury kini sudah kebanyakan harta dan tak perlu uang lagi.

"Saya ingin dia pulang sekarang. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dibuktikan, itu intinya. Jika dia memiliki sesuatu yang tersisa untuk dilakukan, saya akan mengatakan 'Ya Tyson, lakukanlah'. Jadi, kecuali dia benar-benar ingin bertinju dan jika dia hanya melakukannya demi uang atau ketenaran, dia tidak membutuhkan itu," kata Paris usai duel Fury vs Whyte, dikutip ari The Sun.

"Dia pria paling terkenal di planet ini malam ini. Dia tidak perlu menjadi lebih terkenal. Kami sangat diberkati dan beruntung tidak membutuhkan uang lagi. Suami saya telah melakukan apa pun yang bisa dia lakukan."

"Saya senang dengan apa yang kami miliki dan apa yang kami miliki. Bagi Tyson untuk terus bertinju, sepertinya 'Untuk alasan apa?'. Saya tahu dalam hati saya, saya pikir satu-satunya alasan Tyson akan kembali adalah untuk pertarungan unifikasi," jelasnya.

Ya, Tyson Fury rumornya ditawarkan bayaran terbesar dalam sejarah tinju jika membatalkan rencana pensiun dan melakukan duel untuk meraih sabuk lain. Besaran uangnya digadagadag sebesar 100 juta pounds (sekitar Rp 1,8 triliun).

Namun, perkataan Fury dalam konferensi pers usai laga tak mengindikasikan bahwa ia ingin sabuk lain sekarang. "Saya telah memenangkan setiap sabuk yang ada. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan."



TYSON FURY

Saya telah memenangkan setiap sabuk dalam pertarungan. Jika ini adalah permainan komputer, itu akan tamat, itu pasti," tegasnya.

Tyson Fury sekarang cuma memegang titel WBC dan The Ring. Pada 2014, ia pernah meraih titel Eropa, WBO International, dan British. Pada 2015, ia meraup titel WBA (Super), IBF, WBO, dan IBO. (berbagai sumber/dya)

●●●●	
TYSON FURY TAJIR MELINTIR	
Vs Derek Chisora (29/11/2014):	Rp 221 miliar, 127 Pukulan
Vs Christian Hammer (28/02/2015):	Rp 92,3 miliar, 112 Pukulan
Vs Wladimir Klitschko (28/11/2015):	Rp 142 miliar, 97 Pukulan
Vs Sefer Seferi (09/06/2018):	Rp 36,9 miliar, 49 Pukulan
Vs Deontay Wilder 1 (01/12/2018):	Rp 228 miliar, 84 Pukulan
Vs Francesco Pianeta (18/08/2018):	Tidak diketahui, tetapi diyakini lebih sedikit dibandingkan yang lain.
Vs Tom Schwarz (15/06/2019):	Rp 147 miliar, 37 Pukulan
Vs Otto Wallin (14/09/2019):	Rp 256 miliar, 179 Pukulan
Vs Deontay Wilder 2 (22/02/2020):	Rp 583 miliar, 135 Pukulan
Vs Deontay Wilder 3 (09/10/2021):	Rp 559 miliar, 150 Pukulan



SAKIT TENGGOROKAN SAAT MUSIM PANCARоба, REDAKAN DENGAN TEH INI

MEMASUKI musim pancaroba, kebanyakan orang mulai merasakan nyeri atau sakit tenggorokan, sulit menelan, hingga suara serak. Gejala tersebut disebabkan oleh beragam gangguan atau penyakit, seperti infeksi virus, alergi, penyakit asam lambung, dan lainnya.

Meski sering dianggap sepele, sakit tenggorokan juga merupakan salah satu gejala awal infeksi virus Corona yang sering dikeluhkan banyak orang. Inilah pentingnya melakukan rapid test atau PCR untuk memastikan apakah positif atau negatif Corona.

Dengan meminum air hangat seperti teh dapat membantu menenangkan selaput lendir tenggorokan yang teriritasi dan meningkatkan aliran darah ke jaringan tubuh. Dilansir dari Insider, ada teh yang bisa meredakan sakit tenggorokan. Apa saja, sih? Check this out!



Teh Akar Licorice

Ada beberapa penelitian yang mendukung bahwa akar licorice dapat menghilangkan dahak dan lendir serta membantu menenangkan sakit tenggorokan. Tiga zat utama dari akar licorice, yaitu liquiritin dan liquiritigenin berperan sebagai ekspektoran, yang melancarkan lendir dan membuatnya lebih mudah untuk batuk.

Selanjutnya, glycyrrhizin berperan sebagai penenang, yang memberikan lapisan pelindung di tenggorokan, dapat mencegah iritasi saat menelan makanan dan minuman. Teh akar licorice dijual di berbagai marketplace, untuk penyajiannya cukup seduh dengan air panas atau hangat.

Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi teh licorice dapat meredakan batuk dan sakit tenggorokan. Tak hanya itu, licorice juga dipercaya bermanfaat untuk meringankan gejala asma. Meski demikian, manfaat licorice untuk melancarkan saluran pernapasan ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Ekstrak licorice dipercaya dapat meredakan gejala penyakit GERD, seperti sensasi terbakar di dada dan nyeri perut. Kandungan antioksidan di

dalam licorice juga diyakini dapat menghambat penyebaran bakteri *H.pylori* penyebab tukak lambung.



Teh Akar Marshmallow

Akar marshmallow memiliki lendir alami dari serat lunak dan akan mengembang saat terkena air. Selain itu, akar marshmallow mengandung antioksidan flavanoid, asam amino, dan senyawa lainnya. Iritasi pada tenggorokan dapat berkurang jika kamu mengonsumsi teh akar marshmallow, karena adanya sifat antitusif. Lendir akar marshmallow juga berfungsi mengencerkan batuk dahak.

Kandungan lendir yang dimiliki akar tanaman marshmallow dipercaya sebagai obat alami batuk dan pilek. Sebuah riset dari 2005 sudah membuktikan bahwa sirup batuk herbal yang mengandung akar marshmallow efektif dalam mengatasi batuk akibat pilek, bronkitis, dan beberapa penyakit saluran pernapasan lainnya yang menyebabkan pembentukan lendir.

Sirup batuk herbal tersebut juga dilengkapi dengan kandungan timi, adas manis, dan ekstrak daun ivy kering. Setelah 12 hari, sekitar 62 partisipan mampu mengatasi gejala batuknya hingga 86-90 persen.

Cara membuat teh akar marshmallow, cukup 1 sendok teh marshmallow ditambah 200 mililiter air mendidih, lalu diamkan selama 10 menit. Jika ingin manis, tambahkan pemanis alami seperti stevia.



Teh Hijau

Senyawa antioksidan kuat di dalam teh hijau, disebut polifenol yang dapat membantu sistem kekebalan tubuh melawan virus pilek dan flu. Teh hijau juga memiliki sifat anti-inflamasi

Beberapa jenis teh yang bisa meredakan sakit tenggorokan
Foto-foto: Berbagai sumber



yang dapat membantu meringankan rasa tidak nyaman saat sakit tenggorokan.

Umumnya, sakit tenggorokan paling sering disebabkan oleh radang faring, atau bagian belakang tenggorokan karena pilek atau flu. Untuk mendapatkan manfaatnya, kamu bisa meminum teh hijau atau mencoba dengan metode berkumur.

Jika kamu memilih mencoba metode berkumur dengan teh hijau, pastikan menggunakan air hangat, bukan air panas, karena suhu panas dapat membakar tenggorokan dan mengiritasinya lebih jauh. Sebaiknya berkumur dengan teh hijau selama 30 detik, selanjutnya kamu dapat berkumur lagi dua jam kemudian.

Teh Jahe

Akar jahe memiliki sifat pereda nyeri dan anti-inflamasi dari kandungan senyawa yang disebut gingerol dan shogaols yang dapat menenangkan sakit tenggorokan. Jahe



juga dapat meredakan pilek atau flu, karena memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu melawan infeksi virus.

Cara membuat teh jahe cukup gampang, kupas jahe dan memarkan. Selanjutnya, didihkan air bersama jahe, masukkan daun teh atau teh sachet. Tambahkan madu jika ingin mendapatkan rasa manis alami. Nah, beberapa jenis teh yang bisa meredakan sakit tenggorokan di atas juga bisa kamu konsumsi untuk mencegahnya. Selamat mencoba! (berbagai sumber/dya)

KEKHAWATIRAN KALA BUNGA SAKURA MEKAR LEBIH CEPAT

BUNGA SAKURA Jepang mekar yang lebih cepat dibandingkan biasanya. Ada campur tangan ulah manusia dalam proses ini.

Wisatawan senang dengan fenomena itu. Sebab, berwisata ke Jepang saat bunga sakura bermekaran dinilai sebagai waktu terbaik.

Namun, di balik suka cita wisatawan menikmati indahnya sakura, ada kekhawatiran yang tersembunyi di balik bunga sakura yang mekar lebih awal. Tanaman dengan bunga berwarna merah muda itu disebut cepat mekar karena perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia.

Para peneliti dari Met Office di Inggris dan Osaka Metropolitan University di Jepang mengatakan krisis iklim dan pemanasan perkotaan telah memicu majunya periode berbunga dari "puncak mekar" sakura selama 11 hari.

Pada 2021, bunga sakura di pusat kota bersejarah Kyoto mencapai puncaknya pada 26 Maret, yang merupakan periode mekar penuh paling awal dalam 1.200 tahun terakhir. Pada tahun ini, bunga sakura bermekaran pada 1 April. Para ilmuwan menyebut proses mekar bunga sakura saat ini merupakan sesuatu yang umum.

Tren sakura mekar dilaporkan bertepatan dengan kenaikan suhu yang terjadi di sejumlah wilayah Jepang. Suhu rata-rata pada Maret di pusat kota Kyoto disebut meningkat beberapa derajat sejak masa pra-industri. Para ilmuwan menilai hal tersebut dikarenakan pengaruh perubahan iklim dan pemanasan perkotaan.

Mereka mengatakan peningkatan urbanisasi menyebabkan kota cenderung lebih hangat dibandingkan daerah pedesaan di sekitarnya. Itu karena bangunan dan jalan menyerap panas matahari lebih banyak daripada

pemandangan alam. Fenomena ini dikenal sebagai efek pulau panas.

Meski begitu, para ilmuwan menyebut alasan utama sakura mekar lebih cepat yakni karena krisis iklim. Krisis iklim disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang mengakibatkan suhu di seluruh wilayah dan dunia meningkat.

Menurut studi yang dilakukan Met Office, bila emisi gas rumah kaca terus berlanjut, diperkirakan akhir abad ini bunga sakura Kyoto bisa mulai datang lebih awal yakni sekitar satu minggu lagi. "Penelitian kami menunjukkan bahwa tidak hanya perubahan iklim yang disebabkan manusia dan pemanasan perkotaan yang telah berdampak pada musim mekar bunga sakura di Kyoto, tetapi musim mekar yang sangat awal seperti pada tahun 2021, sekarang diperkirakan 15 kali lebih mungkin, dan diperkirakan terjadi setidaknya sekali dalam satu abad," kata doktor dan penulis utama dan ilmuwan iklim Met Office, Nikos Christidis

"Peristiwa seperti itu diproyeksikan terjadi setiap beberapa tahun pada tahun 2100 ketika mereka tidak lagi dianggap ekstrem." Bunga sakura sebelumnya memiliki konsekuensi yang lebih luas bagi ekonomi dan ekologi Jepang. Gejala dari krisis iklim yang lebih besar akibat cepat mekarnya sakura mengancam ekosistem di mana-mana.

Studi Met Office menyebut kenaikan suhu pada kalender alam



(Ilustrasi) Penyebab dan kekhawatiran kala bunga sakura mekar lebih cepat
Foto : Istimewa

berdampak pada praktik pertanian dan pengelolaan lahan di negara itu. Hal tersebut juga berdampak pada tanaman, serangga, dan hewan yang sangat bergantung satu sama lain untuk perkembangan dan siklus hidup mereka. Perubahan siklus ini dapat memulainya reaksi berantai yang menyebabkan kerusakan ekosistem.

Misalnya, tanaman merasakan suhu di sekitar mereka yang jika cukup hangat dengan periode konsisten, bunga dan daunnya dapat bermunculan. Begitu pula dengan panas yang lebih tinggi yang dapat menyebabkan pertumbuhan pada

serangga dan hewan lainnya menjadi lebih cepat.

Perubahan tanggal berbunga tidak terbatas pada Jepang maupun bunga sakura. Tahun ini, musim semi datang lebih awal di beberapa bagian Inggris. Perubahan iklim menyebabkan tanaman di seluruh Kepulauan Inggris berbunga, yang rata-rata sebulan lebih awal dari biasanya. Fenomena yang sama juga telah terjadi pada sejumlah tanaman yang bernilai ekonomi. Hal ini menimbulkan masalah besar bagi ketahanan pangan dan mata pencaharian petani. (berbagai sumber/dya)



BATU APUNG BISA ATASI KULIT KAKI PECAH-PECAH?

Sebagian orang, mungkin mengalami masalah pada kulit kakinya yang kering, kasar dan pecah-pecah. Dikutip dari MedicalNewsToday, ternyata kulit kaki yang cenderung kering, kasar atau pecah-pecah adalah hal yang biasa. Hal ini karena kaki memiliki lebih sedikit kelenjar minyak dibandingkan bagian tubuh yang lain.

Karena itulah kulit kaki ini cenderung lebih kering dibanding bagian lain. Meski demikian, kulit kering di kaki ini bisa diredakan menggunakan perawatan sendiri di rumah.

Terdapat sejumlah hal yang bisa menyebabkan kulit kaki kering, selain kurangnya kelembaban akibat sedikitnya kelenjar minyak di kaki. Di antara penyebab kulit kaki kering adalah berdiri terlalu lama atau menggunakan sepatu yang tidak pas.

Hal tersebut bisa menyebabkan tekanan yang konstan pada kaki. Pada akhirnya, tekanan ini menyebabkan gesekan pada kulit sehingga area kaki tersebut menjadi kering, kapalan atau pecah-pecah. Selain itu, sepatu yang tertutup seperti sepatu kets dan sepatu bot juga bisa mengakibatkan permukaan kaki menjadi panas dan lembap.

Panas akan menarik kelembapan dari kulit dan menyebabkan area kaki kering, tebal atau pecah-pecah. Penggunaan sabun dan sabun mandi yang mengandung bahan kimia yang terlalu keras juga bisa menjadi penyebab kulit kaki mengering. Selain itu, penuaan juga menjadi faktor yang tak bisa dihindarkan yang bisa menyebabkan kulit kaki menjadi kasar dan pecah-pecah. Terakhir, adanya jamur, eksim, psoriasis, diabetes, hipotiroidisme juga bisa menjadi salah satu penyebab kulit kaki kering.

Lantas bagaimana cara mengatasinya? Kulit kaki yang kering memerlukan perawatan khusus. Area kering pada tumit misalnya, jika dibiarkan bisa membuat kaki rentan pada infeksi. Sedangkan kapalan yang tebal bisa membuat kaki sulit berjalan atau menimbulkan ketidaknyamanan. Adapun untuk menghilangkan kulit kering pada kaki bisa dicoba dengan cara berikut:

EKSFOLIASI

Tahap ini adalah mengelupas kulit mati pada lapisan permukaan memakai exfoliator fisik atau kimia. Exfoliator fisik meliputi scrub kaki, atau sikat tubuh. Scrub kaki adalah cara mengangkat sel kulit mati di kaki yang cukup populer. Cara ini dilakukan dengan lulur khusus kulit kaki yang dapat diperoleh di toko atau membuat sendiri di rumah. Anda bisa



(Ilustrasi)
Beberapa cara menghilangkan kulit kering pada kaki
Foto : Nataliya Vaitkevich

mencampurkan madu, air hangat, dan gula sebagai bahan scrub alami untuk kaki agar tampak lebih sehat.

Selain scrub kaki, chemical peeling atau eksfoliator kimiawi juga bisa digunakan sebagai cara menghilangkan sel kulit mati pada tubuh, termasuk kaki. Metode yang satu ini biasanya hanya diperbolehkan dengan bantuan ahli dermatologi atau dokter kulit.

Hal ini dikarenakan chemical peeling memanfaatkan losion atau cairan encer yang mengandung berbagai jenis asam. Jenis asam ini membantu mengangkat sel kulit mati dan membentuk sel kulit baru yang sehat.

Contoh senyawa yang digunakan dalam eksfoliasi kimiawi, yaitu salisilat, glikolat dan retinol untuk kulit. Ketiga jenis bahan kimia tersebut bekerja dengan cara yang berbeda. Namun, asam yang telah disebutkan tersebut sama-sama memperbaiki warna dan tekstur kulit.

RENDAM KAKI

Merendam kaki dengan air hangat bisa membantu menenangkan dan mengendurkan kulit kering. Selain itu bisa meningkatkan sirkulasi darah ke kaki. Merendam kaki dengan larutan air garam memang bermanfaat bagi tubuh, namun kita tidak bisa menggunakan sembarang garam.

Perlu diketahui jika perawatan ini cukup banyak ditemui di pusat spa dan perawatan tubuh serta cukup praktis

untuk dilakukan sendiri di rumah. Jika merendam kaki dengan air garam, bukan berarti bisa menggunakan garam dapur yang sering digunakan untuk memasak.

Hasilnya akan menjadi maksimal jika dilakukan menggunakan garam Epsom. Apa itu? Dilansir dari laman Healthline.com, garam Epsom adalah senyawa magnesium sulfat, tidak seperti sodium garam dapur. Magnesium dalam garam Epsom dapat diserap melalui kulit, sehingga meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Garam Epsom atau di Indonesia lebih dikenal dengan garam Inggris sudah dapat dibeli di toko online. Harganya terjangkau yaitu sekitar Rp8-65 ribu tergantung dengan besarnya kemasan.

BATU APUNG

Batu apung bisa dipakai untuk menggosok kaki dan menghilangkan kulit kering dan kapalan di kaki. Tapi masih banyak orang yang belum mengetahui cara menggunakan batu apung dengan benar. Penasaran bagaimana caranya? Berikut ini cara batu apung bisa menyembuhkan kulit kering dan pecah-pecah pada kaki, dilansir dari Boldsky.

Pertama, ambil baskom berisi air hangat dan tambahkan sabun ke dalamnya, Anda dapat menambahkan minyak esensial untuk memberi nutrisi yang lebih baik pada kaki Anda. Rendam kaki Anda dalam air sabun ini selama 10-15 menit.

Selanjutnya, celupkan batu apung ke dalam air sabun yang sama selama beberapa detik. Keluarkan kaki Anda dan gunakan batu apung basah untuk menggosok area yang bermasalah dengan gerakan memutar selama 3-5 menit. Bersikaplah lembut namun tegas dengan gerakan memutar. Anda akan melihat kulit kering dari kaki Anda saat Anda menggunakan batu.

Setelah Anda selesai menggunakan batu apung tersebut, basuh kaki Anda dengan air hangat dan keringkan. Sebagai penutup, pijat krim kaki atau pelembab ke kaki Anda. Ini akan membuat kaki Anda rileks dan mengunci kelembapannya (berbagai sumber/dya)



Subsidi Migor Curah Disetop ... (dari hal 1)

KEBIJAKAN subsidi minyak goreng untuk masyarakat dalam bentuk minyak curah dengan harga Rp14.000 per liter akan berakhir pada 31 Mei mendatang. Sebagai gantinya, pemerintah memberlakukan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) minyak sawit atau CPO.

"Sampai dengan 31 Mei, program berbasis subsidi ini selesai. Program bersubsidi minyak goreng curah ini akan diganti dengan kebijakan DMO dan DPO," ungkap Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR, Selasa (24/5).

Ia menjelaskan, program subsidi minyak goreng curah berhasil menekan harga minyak goreng di pasar, dari sekitar Rp19 ribu - Rp20 ribu menjadi Rp16 ribu- Rp17 ribu per liter. "Saat minyak kemasan premium dan sederhana itu dilepas (ke pasar), harga curahnya juga naik. Program (subsidi) ini dapat terus mengendalikan harga, sehingga program kembali ke DMO," ujar Putu.

Adapun kebijakan DMO-DPO dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil. Aturan tersebut juga diterbitkan seiring pencabutan pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya.

Putu menambahkan, meski kebijakan subsidi minyak goreng dihapus, Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah) masih tetap digunakan Kemenperin kedepannya. Diketahui bahwa, sejak 15 Maret hingga akhir Mei ini, Kemenperin mendapat tugas mengawasi dan memerintahkan industri minyak sawit yang terdaftar dalam program pemerintah wajib mendistribusi minyak goreng curah ke masyarakat. Melalui Simirah, Kemenperin memantau penyaluran minyak goreng curah.

"Simirah tetap digunakan untuk mengitung ekspor, lalu fasilitasi

industri untuk bisa melaksanakan produksi sampai ke pengecer. Kemenperin itu sebagai pengelola Simirah untuk program berikutnya," kata Putu.

Terkait harga migor curah yang tak sesuai HET, dia menyebut masyarakat belum percaya minyak goreng curah sesuai HET itu ada. "Kami melakukan langkah-langkah untuk HET terjaga salah satunya memasang spanduk bahwa ini minyak goreng curah bersubsidi atau minyak goreng curah HET. Itu sudah kami lakukan. Tetapi dalam praktiknya, masyarakat belum confident bahwa minyak itu ada," katanya.

Lebih lanjut, Putu menyatakan ketidakpercayaan masyarakat itu disebut dimanfaatkan pengecer atau retailer yang menjual minyak goreng curah di atas Rp 14.000/liter. "Itu dijadikan kesempatan oleh pedagang, 'kalau memang bisa dibeli Rp 17.000/liter kenapa harus jual Rp 14.000/liter?' Itu yang terjadi pada saat hari raya keagamaan," lanjutnya.

Alasan kedua, ia mengungkap sebelumnya penegak hukum tidak sekeras pada saat ini dan ke depannya. Putu mengklaim bahwa saat ini distribusi minyak goreng curah Rp 14.000/liter sudah berjalan baik.

"Pada saat itu penegak hukum tidak sekeras saat ini sampai ke depan, di mana kita sudah bisa menjaga suplai continue stoknya ada di sebelah distributor dan pengecer agar bisa mengembalikan confident sentimental pasar," tutupnya.

Terpisah, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan, menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengatur kembali ekspor CPO, RBD palm oil, RBD palm olein, dan used cooking oil (minyak jelantah) karena pasokan CPO dalam negeri diklaim telah dianggap mencukupi. "Namun, pemerintah memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan CPO di dalam negeri dan keterjangkauannya bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah," sebutnya dalam keterangan pers.

Permendag Nomor 30 Tahun 2022 menetapkan, eksportir harus memiliki dokumen Persetujuan Ekspor (PE) sebagai syarat mengekspor CPO dan produk turunannya sesuai dengan

yang diatur dalam permendag tersebut. Adapun, masa berlaku PE adalah enam bulan.

Ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh PE. Pertama, eksportir harus memiliki bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dengan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation/DPO) kepada produsen minyak goreng curah. Kedua, bukti pelaksanaan distribusi DMO minyak goreng curah dengan DPO kepada pelaku usaha jasa logistik eceran dan membeli CPO dengan tidak menggunakan DPO.

Terakhir, bukti pelaksanaan distribusi DMO produsen lain yang didahului dengan kerja sama antara eksportir dan produsen pelaksanaan distribusi DMO. Hal ini melalui Indonesia National Single Window (INSW) berupa elemen data elektronik nomor induk berusaha dan nama perusahaan.

"Pembukaan ekspor berbasis DMO dan DPO dengan besaran akan ditetapkan dan dievaluasi setiap saat," ungkap Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan Sementara itu, sanksi bagi eksportir yang tidak memenuhi ketentuan antara lain mendapat sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik di Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), pembekuan PE, hingga pencabutan PE.

Audit Kelapa Sawit

Terpisah, Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyinggung 'Menko Minyak Goreng' setelah Menko Marines Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut mengurus masalah persoalan minyak goreng (migor). Luhut buka suara menanggapi soal 'Menko Minyak Goreng'.

"Saya hanya bantu saja. Jadi kalau ada tadi Demokrat yang tanya-tanya itu, tanya ke diri dia," kata Luhut di JCC, Selasa (24/5).

Herzaky juga menyinggung akan ada ketidakseimbangan dalam kabinet jika hanya Luhut yang dipercaya Jokowi. Luhut mengatakan, bukan hanya dirinya, tapi semua menteri di dalam kabinet turut dilibatkan dan

bekerja."Saya hanya membantu saja, kerja kita semua sama, kerja keras. Tadi menteri perdagangan juga sama," ujarnya.

Luhut kemudian menjamin persoalan minyak goreng akan segera terselesaikan. Kata Luhut, hal ini bisa terlihat dari suplai yang cukup hingga harga yang berangsur turun.

"Sekarang saya kira insyaallah akan beres tuh minyak goreng, yang penting kan selesai. Ya insyaallah akan beres," ujarnya. "Supply hari ini sudah cukup, lebih dan sekarang harga sudah mulai turun kita pastikan distribusi jalan, penyaluran jalan, pengawasan jalan oleh Satgas pangan," imbuh Luhut.

Luhut menambahkan, pihaknya juga akan melakukan audit kelapa sawit pada Juni mendatang. Nantinya, semua aspek akan diperiksa dalam audit tersebut.

"Nanti kita audit semua kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan, luasnya berapa, HGU-nya, HPL, statusnya sudah jelas, kemudian dia punya plasmanya, produksinya, kemudian headquarter-nya," kata dia.

Luhut juga menyampaikan, tidak boleh ada headquarter kelapa sawit yang berasal dari luar wilayah NKRI. "Tidak boleh ada headquarter kelapa sawit yang di luar wilayah Republik Indonesia. Harus di Indonesia, supaya pajaknya," imbuh Luhut.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai diperlukan biaya transportasi dalam proses distribusi minyak goreng curah untuk memastikan harga komoditas tersebut sesuai dengan HET, yakni Rp14.000 per liter. Terkait dengan biaya transportasi proses distribusi, dia mengatakan pemerintah bisa mengalokasikan anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Semestinya penganggarnya ada. Sebab, dana BPDPKS yang diperoleh dari pungutan ekspor jumlahnya triliunan rupiah. Jadi, bukan dari APBN," ujarnya. Dana BPDPKS, sambungnya, dialokasikan untuk berbagai macam kepentingan, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemerataan distribusi minyak goreng. (surya,mira,isti,rls,ant/dya)

PERUBAHAN HARGA MINYAK GORENG DI PASAR

No.	Komoditas (Rp)	17/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
	Minyak Goreng	24.450	24.400	24.350	24.250	24.150	24.150
1	Minyak Goreng Curah (kg)	19.100	19.050	18.950	18.900	18.700	18.600
2	Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 (kg)	26.900	26.850	26.800	26.750	26.850	26.650
3	Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 (kg)	25.900	25.850	25.800	25.700	25.600	25.600





Drs. H. ACHMAD ISKANDAR, M.Si
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Hj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

KUSNADI, SH., M.Hum
KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

H. ANWAR SADAD, M.Ag
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

SAHAT TUA P. SIMANJUNTAK, SH
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

KOMISI D DPRD JATIM KAWAL PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN ASDP PACIRAN



Ketua Komisi D DPRD Jatim, dr Agung Mulyono (baju hitam) saat menyampaikan tujuan kunjungan ke Pelabuhan Penyeberangan ASDP Paciran, Lamongan, Selasa (24/5/2022).

LAMONGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur melalui Komisi D, mengawal dan memberikan dukungan pada pengembangan pelabuhan-pelabuhan yang ada di bawah pengelolaan Pemprov Jatim. Salah satunya adalah Pelabuhan Penyeberangan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Selasa (24/5/2022).

Ketua Komisi D DPRD Jatim, dr Agung Mulyono, saat melakukan peninjauan di pelabuhan yang ada di Pantai Utara Lamongan ini mengharapkan pengembangan pelabuhan berjalan lancar dan selalu ada progresnya. Dia menyebutkan bahwa pelabuhan Paciran ini termasuk dalam pelabuhan utama yang melayani dua pelayanan yaitu penyeberangan dan angkutan laut. Sedangkan beberapa pelabuhan lainnya yang ada di Jatim dan di bawah kewenangan Pemprov Jatim masih dalam kategori pelabuhan perintis.

Dalam kunjungan tersebut, Agung Mulyono didampingi para anggota Komisi D diantaranya Makin Abbas, Abdul Aziz, Surawi, Makin, Masduki, Sugeng Pujiyanto, dan Musyafa Nur. Kemudian dari Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jatim diwakili oleh Kabid Perhubungan Laut, Luhur Prihadi Eka.

Terkait dengan pengawalan tersebut, dr Agung yang merupakan politisi Partai Demokrat ini meminta

kepastian proses pengembangan pelabuhan yang mendapatkan anggaran dari Pemprov Jatim senilai Rp 50.184.500.000 yang bersumber dari APBD 2022. Pasalnya, anggaran tersebut dinilai cukup besar dibandingkan dengan lima pelabuhan lain di Jatim yang ada di bawah pengelolaan Pemprov Jatim.

“Kunjungan ke Pelabuhan Paciran ini, jadi kita mengklarifikasikan terkait dengan beberapa pertanyaan anggota dan teman-teman yang lain terkait dengan anggaran di pelabuhan Paciran ini kenapa (mencapai) Rp 50 miliar itu,” tandasnya.

Agung mengatakan berdasarkan dari pertemuan tersebut diketahui bahwa sebenarnya penganggaran itu sudah melalui pembahasan antara Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan Komisi D DPRD Jatim pada 29 November 2021 yang lalu. “Tadi disampaikan Pak Luhur sudah berbicara dan tersampaikan pada paparan 29 November 2021,” tambahnya.

“Saya sempat konfirmasi ke Pak Kadis kenapa Lamongan gede, kenapa Madura kecil, jawaban salah satunya karena Lamongan pelabuhan gede dan pelabuhan utama, kalau sana (Madura) pelabuhan perintis, kalau di sini pelabuhan antar pulau, barang dan penumpang, kapalnya besar-besar,” sambungnya lagi.

Dari kunjungan tersebut juga diketahui bahwa, sampai saat ini proyek dengan anggaran Rp 50 miliar

lebih itu masih dalam proses lelang dan belum ada penunjukan pemenangnya. “Intinya adalah sesuai dengan proses yang berjalan, dan memang kami tidak ceremat dan detailnya seperti apa, namun bagaimana pelabuhan terus berkembang dan progress dan terus perbaikan. Kalau lelang itu urusan dinas terkait. Kita intinya meminta progresnya bagaimana, masalahnya apa, solusinya apa,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jatim, Makin Abbas, juga mendukung pengembangan pelabuhan Paciran yang diresmikan pada 29 April 2013 ini. Dia memaparkan bahwa pelabuhan ini dulunya hanya melayani penyeberangan ke Pulau Bawean saja, namun saat ini sudah melakukan penyeberangan ke pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, kemudian ke Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang masing-masing seminggu sekali.

“Ke Sulawesi sudah, ke Kalimantan sudah, ke Bawean sekarang seminggu dua kali, nah yang belum ini ke Sumatera. Nah, ini nanti saya harapkan ada pembukaan penyeberangan ke Sumatera,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Dapil Lamongan-Gresik ini.

Sementara itu, Kabid Perhubungan Laut Dishub dan LLAJ Jatim, Luhur Prihadi Eka, menjelaskan bahwa pada awalnya anggaran yang diajukan untuk pengembangan pelabuhan penyeberangan ASDP Paciran, Lamongan ini adalah Rp 56 miliar. Tapi, setelah melihat urgensi dari pengembangan diketahui anggaran yang dibutuhkan adalah Rp 50.184.500.000. Dia juga mengaku sudah memberikan hardcopy kebutuhan anggaran tersebut pada Ketua Komisi D DPRD Jatim saat pembahasan pada 29 November 2021 lalu.

“Dan Rp 51 miliar itu kita lelangkan dan sudah kita jelaskan di sana apa saja. Tadi sudah kami jelaskan ada 6 mayor item dari Rp 51 miliar itu. Dan sekarang prosesnya masih lelang sehingga kalau kemarin disinyalir ada korupsi dan lainnya itu tidak benar, karena lelang saja belum selesai dan uangnya masih di Kasda dan belum ke

mana-mana,” tegasnya.

Dia juga menandakan, setelah nanti proses lelang selesai dan sudah ada penunjukan pemenangnya serta sudah dilakukan pelaksanaan pembangunan maka bisa dilakukan pengawasan bareng – bareng. Pengawasan tersebut supaya nantinya diketahui bahwa pengerjaan proyek tersebut sesuai dengan nomenklatur anggaran yang ada.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pekerjaan yang menelan anggaran Rp 50 miliar itu diantaranya Pekerjaan persiapan senilai Rp 980.265.556, Pekerjaan dermaga 5 (174m x 28 m) senilai Rp 31.495.263.168, Pekerjaan Causeway (320 m) senilai Rp 3.919.646.270, Pekerjaan trestle senilai Rp 1.511.302.626, Pekerjaan paving (164 m x 63 m) senilai Rp 5.181.738.424, Pekerjaan akses jalan masuk dermaga 3 (8m x 8 m) senilai Rp 217.510.108, dan Pekerjaan revitalisasi senilai Rp 1.905.345.655. Sehingga total pengerjaan ditambah PPN 11% mencapai Rp 50.184.500.000.

Luhur juga mengakui jika anggaran yang dikucurkan ke Pelabuhan Penyeberangan ASDP Paciran pada tahun 2022 ini lebih besar dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya di Jatim. Diantaranya adalah pelabuhan Jangkar Situbondo senilai Rp 15 Miliar, Pulau Bawean Gresik Rp 8 Miliar, Pelabuhan Masalembu Sumenep Rp 15 Miliar, Pelabuhan Tanjung Tembaha Probolinggo Rp 16 Miliar, dan Pelabuhan Taddan Sampang Rp 15 Miliar.

Dalam kesempatan itu, Luhur juga menjelaskan bahwa pelabuhan Paciran ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Diantaranya adalah penambahan layanan penyeberangan yang dulunya hanya ke pulau Bawean dan itu hanya satu kali dalam seminggu, sekarang sudah menjadi dua kali. Kemudian juga ada penyeberangan ke Garongkong, Sulawesi Selatan seminggu sekali, dan ke Pulang Pisau, Kalimantan Tengah seminggu sekali. Selain itu, untuk angkutan laut juga sudah mencapai 170 kali shipcall setahun, sedangkan pada 2017 lalu hanya 20 kali setahun. (lutfi/widya/adv)